



## **ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI DAN BANTUAN TUNAI TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN**

**Nailah Nur Anisah<sup>1</sup>, Kayla Azzahra Berlandy<sup>2</sup>, Indah Prabawati<sup>3</sup>, Firre An  
Suprpto<sup>4</sup>**

[nailahsastro@gmail.com](mailto:nailahsastro@gmail.com)<sup>1</sup>, [kazzahrab@gmail.com](mailto:kazzahrab@gmail.com)<sup>2</sup>, [indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)<sup>3</sup>,  
[firresuprpto@unesa.ac.id](mailto:firresuprpto@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Negeri Surabaya**

### **Abstrak**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah perlindungan sosial, seperti program subsidi dan bantuan tunai bagi warga dengan penghasilan rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan subsidi dan bantuan tunai mempengaruhi tingkat kemiskinan dan seberapa efektif program tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah dan data statistik kemiskinan. Analisis dilakukan dengan menyelidiki hubungan antara pemberian subsidi dan bantuan tunai dan perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan tunai menurunkan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan daya beli rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan agar program subsidi dan bantuan tunai dapat mencapai penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dengan cara yang paling efisien.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Subsidi, Bantuan Tunai.

### **Abstract**

*Poverty is one of the major challenges in Indonesia's economic development. The government has implemented various social protection measures, such as subsidy programs and cash assistance for low-income households. The objective of this study is to examine how subsidy and cash assistance policies affect poverty rates and to assess the effectiveness of these programs in improving public welfare. This study employs a mixed-methods approach combining qualitative and quantitative methods, utilizing secondary data obtained from official government reports and poverty statistics. The analysis examines the relationship between the provision of subsidies and cash assistance and changes in poverty rates in Indonesia. The results indicate that subsidy and cash assistance policies alleviate the economic burden on the poor and enhance household purchasing power. Therefore, improvements are needed in data collection, monitoring, and policy evaluation systems to ensure that subsidy and cash assistance programs can achieve sustainable poverty reduction in the most efficient manner.*

**Keywords:** Poverty, Subsidies, Cash Assistance.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, kemiskinan adalah masalah struktural yang masih menjadi tantangan utama (Nainggolan et al., 2021; Arifin et al., 2020; Anwar & Wahyuni, 2019). Angka kemiskinan di berbagai wilayah masih menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai program intervensi. Masalah ini tidak

hanya mencerminkan ketimpangan ekonomi tetapi juga terkait dengan masalah sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan sumber daya.

Tingginya angka kemiskinan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat, akses terbatas terhadap pendidikan serta layanan kesehatan, dan sedikitnya peluang ekonomi bagi individu yang berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, usaha untuk mengurangi kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam pandangan pembangunan ekonomi, kemiskinan tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kurangnya akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro dan Smith, 2015).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya dengan menerapkan kebijakan perlindungan sosial. Salah satu kebijakan yang paling umum adalah subsidi dan bantuan tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu orang miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan daya beli rumah tangga, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Subsidi dan bantuan tunai merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang rentan dari tekanan ekonomi (Suharto, 2017).

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program bantuan sosial, termasuk subsidi pada sektor energi dan kebutuhan pokok, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Program-program ini diharapkan dapat membantu orang miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Selain itu, diharapkan bahwa pemberian bantuan tunai juga dapat mendorong konsumsi rumah tangga, mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Khomaini (2020) juga menyelidiki pengaruh program bantuan tunai Indonesia, khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah program bantuan tunai. Program BLT, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 untuk mengimbangi kenaikan harga bahan bakar saat harga minyak dunia naik, adalah salah satu bantuan tunai tanpa syarat yang dianggap dapat merespon keadaan darurat dengan cepat. Studi menunjukkan bahwa BLT di Indonesia tidak meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara subjektif. Penelitian ini belum membahas elemen kesejahteraan subjektif bantuan tunai, tetapi itu dapat membantu menunjukkan bagaimana program bantuan tunai pemerintah sebelumnya berpengaruh.

Selain aspek sosial dan ekonomi, bantuan sosial juga berdampak pada psikologis masyarakat penerima (Purnama et al., 2021). Secara sosial, program ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan solidaritas dan keadilan sosial. Namun, dampak positif dari program ini sering kali diimbangi oleh masalah pelaksanaan, seperti kemungkinan penyalahgunaan anggaran, penyaluran yang tidak transparan, dan data penerima yang tidak akurat (Latif & Pangestu, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan bantuan sosial, tidak hanya dari sudut pandang dampaknya tetapi juga dari bagaimana ia diterapkan.

Meskipun demikian, masih ada banyak tantangan dalam menjalankan kebijakan subsidi dan bantuan tunai. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sebagai akibat dari data yang terbatas tentang kondisi ekonomi masyarakat adalah salah satu masalah yang sering muncul. Selain itu, isu penting dalam evaluasi kebijakan sosial adalah mekanisme distribusi bantuan yang kurang efektif serta kemungkinan masyarakat akan bergantung pada bantuan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara realitas lapangan dan tujuan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terus-menerus diperlukan untuk kebijakan yang telah diberlakukan agar dapat memiliki dampak yang lebih besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan subsidi dan bantuan tunai mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan, seperti bagaimana dampak kebijakan subsidi terhadap pengurangan kemiskinan, bagaimana dampak bantuan tunai terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, dan seberapa besar dampak kebijakan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Kebijakan publik ini mulai dari proses pengambilan kebijakan birokrasi yang aktif menyikapi situasi dan masalah yang muncul dalam pandangan publik dan masyarakat, termasuk masalah tentang isu publik kemiskinan. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik melibatkan apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam upaya mengatasi masalah yang ada. Di dalam pembangunan ekonomi, pembangunan kebijakan publik bertujuan agar sejahtera, oleh sebab itu kebijakan publik membangun ekonominya lebih mengedepankan program sosial ekonomi. Salah satu kebijakan publik yang paling banyak diterapkan oleh pemerintah adalah kebijakan sosial dan subsidi. Kebijakan ini adalah bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi, seperti naiknya harga barang kebutuhan pokok dan ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Kebijakan subsidi dan transfer tunai biasanya merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan sejahteraan masyarakat.

### **2. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)**

Teori negara kesejahteraan mengartikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya dan hal ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan sosial. Gøsta Esping-Andersen menjelaskan negara kesejahteraan sebagai sistem di mana negara mengintervensi warganya melalui perlindungan sosial dalam bentuk jaminan sosial, subsidi, dan bantuan sosial. Pada sistem negara kesejahteraan, negara tidak hanya sebagai pengatur jalannya ekonomi, tetapi juga sebagai penyedia perlindungan sosial bagi masyarakat yang ekonominya rentan. Oleh karenanya, kebijakan subsidi dan bantuan tunai menjadi instrumen yang penting dalam sistem perlindungan sosial. Bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai, subsidi pangan, maupun subsidi energi, adalah bentuk intervensi untuk memastikan masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, bantuan juga berfungsi sebagai pengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan.

### **3. Teori Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk hidup secara layak. Peter Townsend mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan bukan hanya karena kurangnya penghasilan, tetapi juga karena orang tersebut tidak dapat mengakses sumber daya ekonomi dan sosial

yang diperlukan untuk hidup layak. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan umumnya dibedakan menjadi dua kategori yakni, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan relatif terjadi ketika suatu individu memiliki penghasilan yang jauh dibawah rata-rata penghasilan individu lain di lingkungannya. Kemiskinan juga dihubungkan dengan konsep *poverty trap* atau perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang sulit untuk keluar dari kondisi kemiskinan karena terbatasnya modal, pendidikan, atau pun kesempatan ekonomi. Pada kondisi seperti ini peran pemerintah dengan kebijakan sosial seperti subsidi dan cash transfer sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan.

#### **4. Teori Ekonomi Kesejahteraan (Welfare Economics)**

Arthur Cecil Pigou adalah salah satu ekonom yang berpengaruh dalam teori ekonomika kesejahteraan. Ia berpendapat bahwa pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan intervensi seperti pemberian subsidi, pengenaan pajak, dan pemberian bantuan sosial. Dalam teori ekonomika kesejahteraan, subsidi dan bantuan sosial merupakan salah satu bentuk redistribusi pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh aplikasi dari teori ekonomika kesejahteraan dalam kebijakan publik adalah program bantuan langsung tunai, subsidi kesehatan, dan subsidi pendidikan. Ketiga program ini berupaya untuk menjamin akses masyarakat yang kurang mampu kepada kebutuhan dan layanan publik yang termasuk dalam kategori dasar.

#### **5. Konsep Bantuan Tunai (Cash Transfer)**

Transfer uang adalah bentuk bantuan dan kebijakan perlindungan pemerintah yang langsung dan sederhana untuk merespons kemiskinan. Dukungan ini dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dengan memberikan bantuan subsidi uang tunai untuk mendukung kebutuhan dasar mereka secara langsung. Program transfer uang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Conditional Cash Transfer (CCT)* dan *Unconditional Cash Transfer (UCT)*. Program dukungan uang tunai *Conditional Cash Transfer (CCT)* mengharuskan penerima manfaat untuk memenuhi kriteria tertentu, seperti memasukkan anak-anak mereka ke sekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tujuan dari program transfer uang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin, membantu orang-orang yang mengalami tekanan ekonomi akibat naiknya harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan yang ada. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa program transfer uang meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan memperbaiki status sosial ekonomi anggota masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

#### **6. Kebijakan Subsidi sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan.**

Subsidi adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi harga barang dan jasa tertentu agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan subsidi biasanya diterapkan pada sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti energi, makanan, pendidikan, dan transportasi. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, subsidi bertujuan untuk mengurangi beban belanja orang-orang miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih layak. Subsidi juga meningkatkan daya beli masyarakat karena mereka membuat barang dan jasa penting menjadi lebih terjangkau. Terutama selama lonjakan harga dan krisis ekonomi, kebijakan subsidi membantu menstabilkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, adalah hal yang umum bagi pemerintah untuk menggunakan subsidi sebagai instrumen kebijakan untuk

melindungi kelompok yang rentan secara ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan berbagai teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan tunai merupakan instrumen penting dalam upaya pengurangan kemiskinan. Teori kebijakan publik menjelaskan peran pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial, sementara teori negara kesejahteraan menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat yang rentan.

Selain itu, teori kemiskinan menjelaskan kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan seseorang berada dalam kemiskinan, sedangkan teori ekonomi kesejahteraan menekankan pentingnya redistribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan subsidi dan bantuan tunai, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, serta menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

## **METODE**

**Metode Mixed Method (Metode Campuran)** adalah metode penelitian yang menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu **kuantitatif dan kualitatif**, dalam satu penelitian. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai suatu permasalahan, karena tidak hanya melihat data dalam bentuk angka tetapi juga menganalisis makna, kebijakan, dan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dalam penelitian tentang **analisis dampak kebijakan subsidi dan bantuan tunai terhadap pengurangan kemiskinan**, metode mixed method dapat digunakan dengan memanfaatkan dua jenis data. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik mengenai tingkat kemiskinan, misalnya data dari Badan Pusat Statistik atau laporan pemerintah yang menunjukkan perubahan angka kemiskinan sebelum dan sesudah adanya kebijakan subsidi dan bantuan tunai. Melalui data tersebut, peneliti dapat melihat apakah terjadi penurunan atau perubahan tingkat kemiskinan setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program subsidi dan bantuan tunai. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dirancang, dilaksanakan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat yang menerima bantuan.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, metode mixed method memungkinkan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, karena tidak hanya didasarkan pada data statistik tetapi juga didukung oleh analisis teoritis dan kajian kebijakan yang relevan. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas suatu kebijakan dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan tunai dari pemerintah mempengaruhi pengurangan kemiskinan di masyarakat. Program bantuan sosial, seperti subsidi kebutuhan pokok dan bantuan tunai langsung, membantu meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin.

Selain itu, analisis data tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin setelah pemerintah memperluas

program bantuan sosial. Ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan tunai berfungsi sebagai alat perlindungan sosial. Alat ini membantu masyarakat rentan agar tidak jatuh lebih dalam ke kondisi kemiskinan, terutama saat krisis ekonomi atau harga kebutuhan pokok naik. Hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun penurunan ini tidak terlalu besar dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk ketepatan sasaran penerima bantuan, mekanisme penyaluran, dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Jika penyaluran bantuan tidak tepat sasaran atau ada masalah dalam distribusi, dampak kebijakan terhadap pengurangan kemiskinan menjadi kurang optimal.

Secara keseluruhan, kebijakan subsidi dan bantuan tunai bisa memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama dalam jangka pendek. Namun, untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan, kebijakan ini perlu didukung oleh program lain. Program-program tersebut bisa berupa peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan sektor produktif.

### **Pembahasan**

Strategi utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan adalah subsidi dan bantuan tunai. Dengan memberikan bantuan tunai dan mensubsidi biaya barang pokok kepada orang miskin, pemerintah menyesuaikan konsumsi dasar dengan tingkat barang bersubsidi. Ini juga mempertahankan daya beli masyarakat ketika harga barang naik atau ketika ekonomi tidak stabil.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan subsidi dan bantuan tunai meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih miskin. Hal ini memungkinkan keluarga yang lebih miskin untuk mengonsumsi barang dan jasa utama yang memenuhi kebutuhan mereka, seperti makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan, sehingga mengurangi beban pengeluaran keluarga yang lebih miskin. Ini memungkinkan mereka untuk mengonsumsi barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kehidupan sehari-hari mereka.

Oleh karena itu, kebijakan tunai dan subsidi berfungsi untuk melindungi dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan paling rentan terhadap kemiskinan. Sementara kebijakan bantuan tunai dan subsidi memberikan dukungan langsung kepada masyarakat, mereka juga membantu mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi. Ini juga dapat mencegah peningkatan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Selain itu, bantuan tunai dan subsidi dapat membantu keluarga miskin untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini masih sangat bergantung pada bagaimana mereka diterapkan di lapangan. Dampak positif yang seharusnya dihasilkan dapat dikurangi oleh masalah seperti sasaran penerima yang tidak tepat, distribusi bantuan yang tidak merata, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Maka dari itu, diperlukan perbaikan pada sistem pendataan, penyaluran, dan pengawasan untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan manfaat kebijakan sebanyak mungkin.

Dalam perspektif lebih luas, kebijakan subsidi dan bantuan tunai yang diterapkan pemerintah juga sejalan dengan tujuan pembangunan global, khususnya poin 1 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu penghapusan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara nasional, tetapi juga mendukung target global untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan melalui bantuan sosial. Hal ini penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Melalui subsidi dan bantuan tunai, masyarakat dapat mempertahankan daya beli mereka dan meringankan tekanan ekonomi, terutama selama masa krisis.

Namun, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan diperlukan agar kebijakan ini benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 1. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja harus diintegrasikan dengan kebijakan subsidi dan bantuan tunai. Pendekatan yang lebih menyeluruh dapat membantu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan memenuhi tujuan pembangunan jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pengurangan kemiskinan. Program bantuan tersebut mampu membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, bantuan sosial juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan terhadap kondisi ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan program bantuan sosial yang lebih baik agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Dengan demikian, kebijakan subsidi dan bantuan tunai dianggap efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama dalam jangka pendek. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, kebijakan ini harus terus diperbarui dan digabungkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **Saran**

Pemerintah diperkirakan akan memperkuat pelaksanaan kebijakan subsidi dan bantuan tunai untuk memastikan manfaat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkannya, sebagaimana diinformasikan oleh penelitian yang dilakukan. Meningkatkan pengumpulan data penerima bantuan sangat penting untuk memastikan bantuan ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan yang tepat. Selain itu, transparansi dan pengawasan yang lebih baik terhadap sistem distribusi bantuan sangat diperlukan untuk menghilangkan kesalahan distribusi dan memastikan pelaksanaan bantuan yang benar.

Sementara itu, pemerintah juga diharuskan mengintegrasikan kebijakan bantuan sosial dan inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dampak terbesar akan muncul dari pelaksanaan program yang mencakup pelatihan keterampilan dan inisiatif usaha kecil serta dasar-dasar penciptaan pendapatan mandiri melalui pekerjaan, karena tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan, melalui kombinasi kebijakan ini, dapat lebih baik mengatasi kemiskinan di masyarakat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anugrah, A. N. (2021). SDGs Tanpa Kemiskinan. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*.  
Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Program Perlindungan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.  
Nurhasanah, S., Juanda, B., & Sugema, I. (2024). Dampak program bantuan sosial tunai

- terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 30-43.
- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3).
- Pelodu, I. G. A., & Wahyuni, R. N. T. (2024). Dampak bantuan subsidi upah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2023. *Seminar Nasional Official Statistics*.
- Rucianawati, et al. (2025). Social Assistance Policy for SDGs Poverty Reduction. *Journal of Indonesian Economy and Business*.
- Salsabila, N., et al. (2023). Efektivitas Bantuan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *JMSD*.
- Suharto, E. (2017). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syata, W. M. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Mengurangi Kemiskinan.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. New York: Pearson Education.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 7(110).
- World Bank. (2022). *Social Protection and Poverty Reduction*. Washington DC: World Bank.